

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur:

- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.
- Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, Munir, *Hukum Pailit, Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hamidi, J, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lontoh, Rudhy A, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Marzuki, Peter M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Purwosutjipto, H,M,N, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Premada Media, Bandung, 2006
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

_____, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kecana, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soemitro, Ronny H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, PT Intermasa, Jakarta, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2013.

Jurnal:

Sjahdeini, Sutan Remy, Pengertian Utang Dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.17 No.8, 2002.

Slamet, Sri Redjeki, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor, *Lex Jurnalica*, Vol.13 No.2, 2016.

Internet:

Chakim, M, Lutfhi, 6 April 2016, Insolvency, www.lutfichakim.com/2016/04/insolvency.html, Diakses: Senin, 2 Januari 2023.

Fai, 29 Oktober 2022, Hukum Perdata Menurut Para Ahli, www.umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/, Diakses: Rabu, 15 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142).

Sumber lainnya:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021.

